

BAB I

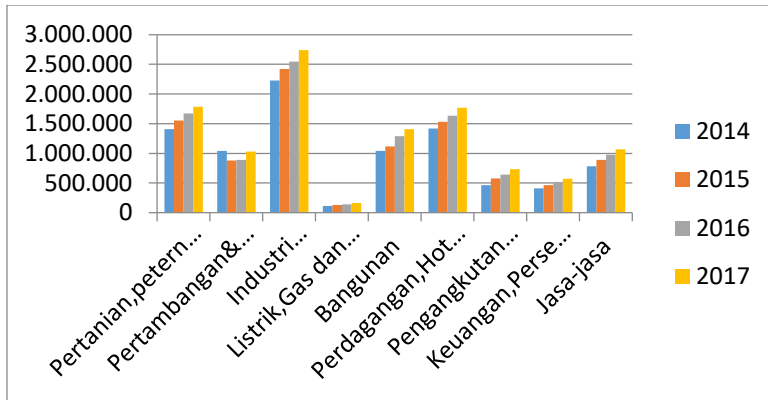
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja.

Jenis-jenis perusahaan manufaktur yang ada pada BEI dibagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Setiap sektor dibagi lagi menjadi beberapa sub sektor. Sektor industri dasar dan kimia dibagi menjadi delapan sub sektor, sektor aneka industri dibagi menjadi enam sub sektor dan sektor industri barang konsumsi dibagi menjadi lima sub sektor. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dipilih karena merupakan perusahaan yang paling dekat dengan manusia, perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia sehingga menjadi tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dipilih karena memiliki persentase PDB yang lebih tinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya. Penelitian ini juga dipilih karena termotivasi untuk melihat apakah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman akan melakukan penghindaran pajak mengingat perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi sehingga memungkinkan perusahaan mendapatkan pendapatan dan laba yang besar yang membuat beban pajak perusahaan tersebut menjadi besar juga.

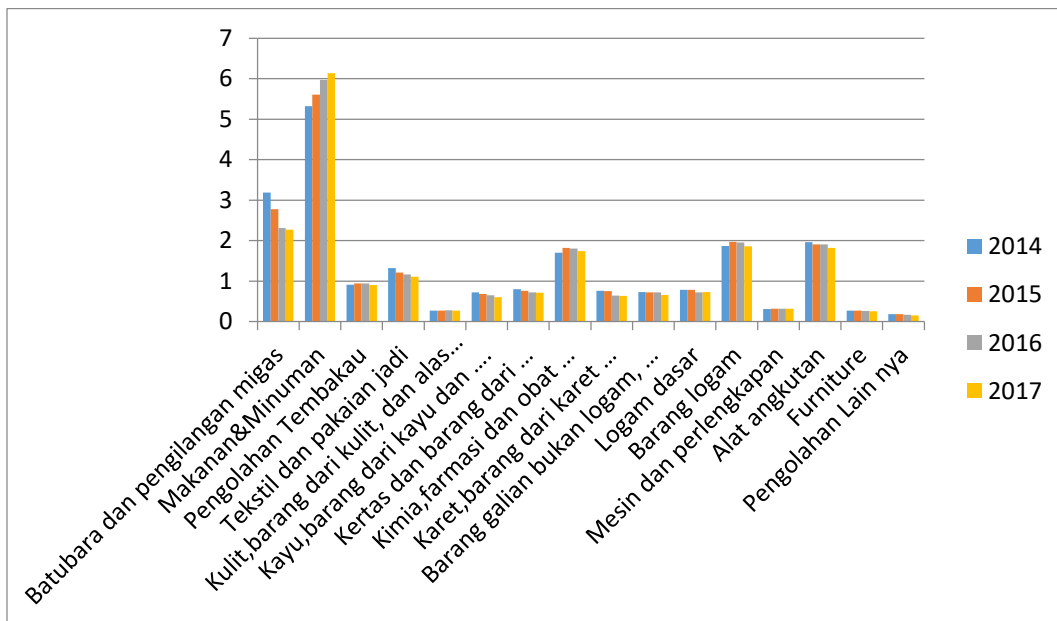
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan pendapatan yang bisa mendukung perekonomian suatu negara. Berikut merupakan grafik pendapatan dari masing-masing sektor.



Gambar 1.1 Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha tahun 2014-2017

Sumber www.bps.go.id (2017) dan data yang diolah (2018)

Grafik diatas menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan/manufaktur memiliki tingkat PDB yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun pada sektor manufaktur dapat diartikan bahwa perusahaan manufaktur memiliki kinerja yang baik.



Gambar 1.2 Persentase distribusi PDB Kategori pengolahan pada sektor manufaktur

Sumber : www.bps.go.id (2017) dan data yang diolah (2018)

Berdasarkan data yang ditunjukkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa industri makanan dan minuman memiliki persentase tertinggi yang meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan industri lain nya. Peningkatan persentase pada industri makanan dan minuman ini memiliki arti bahwa industri makanan dan minuman adalah industri prioritas yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Daftar perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dapat diakses melalui *website* www.sahamok.com yang menyediakan semua daftar perusahaan dari Bursa Efek Indonesia. Dari seluruh total perusahaan yang ada sejak tahun 2014 hingga 2017 akan dipilih beberapa perusahaan untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Pemilihan perusahaan yang akan dijadikan sampel disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu pengaruh antara kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.2 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib pajak, dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.546,7 triliun rupiah (84,8%) dari total pendapatan negara 1.822,5 triliun rupiah dalam APBN-P 2016 (Depkeu, 2016).

Tabel 1.1

Komposisi Penerimaan Pajak dalam APBN tahun 2014-2017 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2014	2015	2016	2017
I				
Penerimaan dalam Negeri	1,545,456	1,496,047	1,546,946	1,732,952
Penerimaan Perpajakan	1,146,865	1,240,418	1,284,970	1,572,709
Penerimaan Bukan Pajak	398,590	255,628	261,976	260,242
II				
Hibah	5,034	11,973	8,987	3,108
Jumlah	1,550,490	1,508,020	1,555,934	1,736,060

Komposisi Perpajakan dalam APBN	74.20 %	82.91 %	83.06 %	90.75 %
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Sumber : www.bps.go.id (2017) dan diolah (2018)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa komposisi pajak dalam jangka waktu 4 tahun terbilang sangat besar yaitu 74.20% sampai 90.75% yang artinya pajak merupakan sumber terbaik untuk penerimaan negara yang sangat mempengaruhi posisi keuangan negara. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya pajak seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk meminimalisir tindakan-tindakan wajib pajak yang dapat mengurangi jumlah pemasukan pajak untuk negara. Karena tindakan tersebut akan sangat merugikan negara.

Peranan pajak yang besar menjadikan pemerintahan Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengoptimalkan sektor pajak dimulai dengan reformasi peraturan perpajakan di tahun 2008 yang menghasilkan revisi UU No.36 tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak. Pada tahun 2013 pemerintah juga memberlakukan pengenaan pajak pada UMKM guna meningkatkan penerimaan sektor pajak.

Selain itu pemerintah juga melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi *self assesment system*. Sistem ini merupakan kewajiban wajib pajak untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan (Suandy, 2014:8).

Berbeda dengan pemerintah, perusahaan wajib pajak memiliki pandangan yang lain mengenai pembayaran pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan, oleh karenanya perusahaan tidak suka jika harus membayar pajak. Berbagai usaha ditempuh perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan melakukan perlawanan pajak. Menurut Suandy (2014:21), perlawanan pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif pada umumnya tidak melakukan suatu upaya untuk menghindari pajak tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan perlawanan aktif adalah tindakan wajib pajak secara langsung untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Hal ini disebut dengan *Tax management*. *Tax management* dibedakan menjadi dua kategori, yang terdiri

dari *tax evasion* dan *tax avoidance*. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan proses pengurangan pajak yang dianggap ilegal atau menyalahi hukum karena tata cara praktiknya melawan regulasi yang berlaku yang dengan sengaja tidak melaporkan pajaknya atau menghilangkan sebagian transaksi untuk meminimalisir jumlah pajak terutang. Kemudian penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu melakukan manajemen pajak dengan cara yang legal karena tidak melawan regulasi yang ada, dengan cara memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Pandangan terhadap penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda, tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan menjadikan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meskipun perilaku ini dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Pengurangan penerimaan pajak tentu berdampak secara tidak langsung pada masyarakat sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak mendapatkan kesan buruk dari masyarakat.

Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong, *et.al.*, 2012). Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan, dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi, sehingga pemegang saham membutuhkan informasi untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak untuk memenuhi kepentingannya (Armstrong, *et.al.*, 2012). Hal ini didukung oleh penelitian Friese, *et.al.* (2006) yang menyatakan bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara semua perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Corporate governance diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal, bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Dalam prakteknya, *corporate governance* memainkan beberapa peran, salah satunya sebagai pengawas dari penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia salah satunya adalah Prima Alloy Steel Universal Tbk. Perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini pada tahun 2011 dan 2012 melaporkan laba komersial sebesar 6.434.749.664 dan 9.976.910.277. sementara laba fiskal tercatat adalah 17.102.135.135.592 dan 31.924.120.525. laba fiskal jauh lebih kecil daripada laba komersial yang artinya perusahaan tersebut melakukan upaya menghindari beban pajak terutang. Padahal ditinjau dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit nya, perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan yang memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang baik.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional. Semakin besar kepemilikan institusional maka kualitas tata kelola perusahaan akan semakin baik yang meminimalkan terjadinya penghindaran pajak. PT Prima Alloy Steel mencatat kepemilikan institusional pada tahun 2011 dan 2012 adalah sebesar 45,76% dan 45,24%. Dengan pencatatan persentase yang besar tersebut seharusnya akan meminimalisir praktik penghindaran pajak. Namun perusahaan tersebut justru melakukan penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh perbedaan pencatatan laba fiskal dan laba komersial.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI mengatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen pada suatu perusahaan minimal 30% dari jumlah komisaris yang ada. Komisaris independen dinyatakan dengan persentase perbandingan jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, PT Prima Alloy Steel memiliki proporsi dewan komisaris sebesar 33,3% yang artinya memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang baik. Seharusnya dengan proporsi sebesar ini akan menekan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun hal ini bertolak belakang dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Ukuran ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan mampu menekan kasus penghindaran pajak. Dilihat dari jumlah komite audit PT Prima Alloy Steel yang beranggotakan 3 orang maka perusahaan ini memenuhi kriteria tata kelola yang baik dimana persyaratan untuk komite audit perusahaan adalah 3 orang. Dengan demikian seharusnya perusahaan tersebut tidak akan melakukan penghindaran pajak namun hal ini tidak sesuai dengan laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA/BEI PADA TAHUN 2014-2017)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, pajak yang bersifat memaksa dan mengurangi laba membuat perusahaan sebagai wajib pajak mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan *tax management*. Perusahaan membentuk *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen pajak dengan memastikan pengurangan pajak tetap dilakukan pada jalan yang legal. Selain itu *corporate governance* juga berperan sebagai pengambil keputusan dalam penghindaran pajak. *Corporate governance* diproksikan menjadi tiga variabel, yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit.

1.4 Pernyataan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017.
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017?

5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1. Untuk mengetahui hubungan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pembelajaran untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

a. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami tentang kondisi pajak perusahaan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batas-batas penelitian yang digunakan untuk mempermudah berjalannya penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Faktor determinan dalam hal ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak antara lain adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang kemungkinan mempengaruhi penghindaran pajak suatu perusahaan.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Jadi penelitian yang dilakukan adalah observasi tidak langsung berupa data sekunder dengan menggunakan data yang ada pada situs www.idx.co.id. Analisis dilakukan dengan mendata laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terpilih sebagai sampel.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian terdiri dari waktu saat menentukan tema dan objek penelitian, studi literatur, menentukan metode sampling dan kriteria sampel, melakukan sampling, pengumpulan data, analisis serta yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Sementara periode penelitian menggunakan laporan tahunan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai struktur penulisan penelitian ini yang terdiri dari lima bab. Sistematika penulisan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari rangkuman teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian, kemudian dilanjutkan dengan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel yang digunakan beserta penjelasannya masing-masing, tahapan dari penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulan data, jenis data, serta teknik analisis data dan hipotesis yang telah dibuat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis yang didapat beserta pembahasan dan interpretasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi kesimpulan hasil analisis, serta saran bagi penelitian selanjutnya.